



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TEUKU NARA SETIA**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **750822**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **5.155.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 17 m2/18 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 975.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/70 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 920.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/40 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 980.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 8 m2/25 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 880.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 4 m2/12 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **261.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, SUZUKI KARIMUN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **1.468.800.000**

D. SURAT BERTHARGA

Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. **60.000.000**

F. HARTA LAINNYA

Rp. **3.500.000.000**

Sub Total

Rp. **10.444.800.000**



III. HUTANG

Rp. 250.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 10.194.800.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.